

## Potensi Ketimpangan di Daerah Terpencil

**MUNDURNYA** pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim, dari 6 Januari menjadi 13 Januari disebut-sebut dampak dari belum turunnya petunjuk teknis pelaksanaan program dari pemerintah pusat. Apalagi dengan komitmen Pemprov Kaltim untuk "menombok" biaya makanan per porsi yang semula hanya Rp 10ribu dari APBN menjadi Rp17 ribu. Di mana sisanya akan dibiayai dari APBD Kaltim.

"Kita masih menunggu petunjuk teknis bagaimana kontribusi pemerintah daerah dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini," ujar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Senin (6/1) lalu.

Pemerintah daerah bagaimana pun akan berupaya untuk menyesuaikan anggaran karena dengan perbedaan wilayah akan menghadapi tantangan perbedaan bahan pokok pangan.

"Kita sudah siap, namun kita juga harus realistis. Ada beberapa daerah yang memang aksesnya sulit. Itu yang menjadi perhatian kita. Kita akan fokus pada daerah-daerah yang memang membutuhkan bantuan lebih seperti daerah terpencil. Kita akan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat setempat untuk memastikan program ini berjalan lancar," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud menyebut program MBG bukan ditunda melainkan masih dalam proses pelaksanaan oleh pemerintah pusat. "Kaltim memang belum melaksanakannya tapi kita sudah menganggarkan di APBD untuk itu. Fokusnya untuk menjaga *stunting*," kata Hasanuddin usai Rapat Paripurna HUT Kaltim pada, Rabu (8/1).

Dari Senayan, anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim, Syafruddin menyebut setelah uji coba yang sudah terlaksana di tiga wilayah yakni Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara (PPU), ditemukan banyak kendala dalam implementasinya. Yang paling krusial adalah kondisi geografis lantaran masih banyak wilayah terpencil termasuk sebaran sekolah yang juga ada di daerah yang sulit diakses.

"Kemudian kendala soal harga bahan makanan. Setiap daerah seperti Kaltim ini biayanya tinggi. Sementara dengan ditetapkannya harga per porsi hanya Rp10 ribu, Kaltim di angka itu enggak masuk harganya. Makanya di Kaltim itu sudah dihitung minimal satu porsi itu Rp17 ribu," sebut Ketua PKB Kaltim itu.

Kendala selanjutnya adalah infrastruktur dan kesiapan terutama dalam menyiapkan dapur umum yang disebut akan menjadi opsi untuk menekan biaya. Karena itu Syafruddin memandang perlu keterlibatan TNI yang disebutkan punya pengalaman dan keterampilan dalam menyiapkan dapur umum ini. Dan sebagai legislator asal Kaltim, dirinya menegaskan akan mengawasi agar MBG ini tepat sasaran dan mampu menaikkan gizi anak-anak Benua Etam.

"Saya akan memberikan atensi dan mengawasi agar pihak yang berwenang bisa mengerjakan MBG ini sesuai sistem yang dibuat di pusat," ujarnya.

Atensi selanjutnya adalah potensi ketimpangan antara sekolah di bawah naungan provinsi dengan kabupaten/kota. Di mana hingga kini, baru Pemprov Kaltim yang memberikan sinyal positif untuk memberikan tambahan anggaran untuk MBG. Karena itu, menurutnya harus ada sinkronisasi anggaran di Pemkot/Pemkab di Kaltim agar ketimpangan tersebut bisa diatasi.

"Saat ini belum maksimal terkoneksi antara program pusat dan daerah karena di batang tubuh APBD pun daerah belum ada nomenklatur terkait untuk menambah kekurangan anggaran biaya MBG yang menyesuaikan harga pangan di Kaltim," ucapnya.

Dengan pusat hanya mematok harga Rp10 ribu per porsi, maka setiap daerah harus duduk satu meja. Untuk bisa mengatasi kekurangan anggaran yang ideal Rp17 ribu per porsi itu, lanjut Syafruddin akan diupayakannya. Di mana sebagai wakil rakyat dia akan mengundang daerah untuk membicarakan persoalan tersebut. "Nanti akan kita bicarakan. Yang pasti harus tepat sasaran dan *outputnya* tidak ada lagi anak-anak di Kaltim yang kekurangan gizi," ucapnya.

### **BENGGAKNYA ANGGARAN**

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi menyebut Kaltim seharusnya lebih dari mampu untuk menjalankan program makan bergizi gratis yang berkualitas. Di atas alokasi anggaran per porsi Rp10 ribu karena ditunjang besarnya APBD Kaltim yang menurutnya sangat besar yakni Rp25 triliun.

"Dengan APBD yang besar, Kaltim lebih dari mampu untuk mengeluarkan subsidi untuk menambah anggaran nasional sebesar Rp10 ribu. Bisa bertambah dari Rp15-25 ribu per porsi untuk per-anak. Karena ini soal kualitas gizi, jangan buat malu rakyat dengan APBD besar tapi kualitas gizinya rendah," ujarnya.

Apalagi jika dihitung secara regional, dirinya mengungkapkan jika ditotal kabupaten/kota, Kaltim pernah memiliki total APBD di angka Rp76 triliun. Sehingga, seharusnya pula tidak ada halangan bagi Kaltim untuk melaksanakan program ini dengan maksimal. Pun jika ada kabupaten/kota yang kesulitan, bisa dilakukan skema subsidi silang.

Sementara itu dari pusat, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengajukan tambahan anggaran untuk program MBG sebab menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, anggaran yang ada hanya cukup untuk sampai bulan Juni 2025 nanti.

Menurutnya, Kepala BGN dan Menteri Pertanian (Mentan) tengah berusaha mencari tambahan dana sebesar Rp140 triliun. Hal itu diungkapnya dalam Rapat Koordinasi terbatas Bidang Pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1). Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran bisa bertambah jadi Rp210 triliun.

"Sekarang Rp71 triliun sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala BGN), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp210 triliun," katanya, Selasa (7/1).

Itu pun diakuinya belum tentu bisa memenuhi keperluan pengadaan untuk program makan bergizi gratis selama setahun penuh. "Tetapi kalau *full* Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp420 triliun lebih. Bayangkan belanja makanan Rp420 triliun," ujar Zulhas. (rd)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Potensi Ketimpangan di Daerah Terpencil, 12/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
  - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
  - b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.